eISSN 0000-0000 & pISSN 0000-0000
JURNAL ILMIAH SOSIO HUMANIORA DAN KEARIFAN LOKAL
Vol. 1, No. 1, Tahun 2026
doi.org/10.63822/jusokal.v1i1.88
Hal. 105-115

Homepage https://ejournal.rumohjurnal.org/index.php/jusokal

Kepemimpinan Sosial Muhammad Tabrani dalam Konstruksi Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional

Moh. Elman
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email Korespodensi: elmanduro@gmail.com

ABSTRACT

This article examines Mohammad Tabrani Soerjowitjitro's social leadership in the construction of Indonesian as a national identity. Rather than treating the 1928 Youth Pledge as the sole point of origin, it traces the social and political work that preceded it: Tabrani's journalism in Hindia Baroe, his proposal to name the unifying language Bahasa Indonesia in 1926, his leadership in the First Youth Congress, and his insistence on the name Indonesian when Mohammad Yamin proposed Malay. Using a critical historical literature review, the article brings institutional histories and historical scholarship into conversation with theories of social leadership, identity construction, imagined communities, and nationalism. It argues that Tabrani was not merely a proposer of a linguistic label; he helped transform language from a means of communication into a national political project. His leadership operated through convening, journalism, negotiation, and the imagination of a political community beyond ethnic and regional boundaries. Recognizing Tabrani's contribution need not erase the work of Yamin, Soegondo Djojopoespito, Ki Hadjar Dewantara, and other actors. Indonesian language history is better understood as a collective process in which Tabrani played a significant conceptual and organizational role. Today, Indonesian should continue to function as a shared civic space without devaluing local languages or suppressing cultural plurality.

Keywords: *Mohammad Tabrani; social leadership; Indonesian language; national identity; Youth Congress; nationalism.*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kepemimpinan sosial Mohammad Tabrani Soerjowitjitro dalam proses konstruksi Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Berbeda dari narasi yang hanya menempatkan Sumpah Pemuda 1928 sebagai titik lahir bahasa persatuan, artikel ini menelusuri kerja sosial dan politik kebahasaan yang mendahuluinya: aktivitas jurnalistik Tabrani di Hindia Baroe, gagasan penamaan "Bahasa Indonesia" pada 1926, kepemimpinannya dalam Kongres Pemuda Pertama, serta keberaniannya mempertahankan nama bahasa Indonesia ketika Mohammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dengan metode kajian pustaka historis-kritis, artikel ini memadukan sumber kelembagaan kebahasaan dan penelitian sejarah dengan teori kepemimpinan sosial, konstruksi identitas, imagined communities, serta nasionalisme. Argumen utama artikel ialah bahwa Tabrani bukan sekadar pengusul istilah, melainkan pemimpin yang mengubah bahasa dari alat komunikasi menjadi proyek politik kebangsaan. Kepemimpinannya bekerja melalui kemampuan membangun ruang pertemuan, memproduksi wacana melalui pers, merundingkan perbedaan, dan membayangkan komunitas politik yang melampaui batas etnis serta bahasa daerah. Artikel ini juga menegaskan bahwa pengakuan terhadap Tabrani tidak perlu menghapus kontribusi Yamin, Soegondo Djojopoespito, Ki Hadjar Dewantara, dan tokoh lain. Sejarah bahasa Indonesia lebih tepat dipahami sebagai hasil proses kolektif yang di dalamnya Tabrani memainkan peran konseptual dan organisatoris yang penting. Implikasi kontemporernya ialah bahwa bahasa persatuan harus terus dirawat sebagai ruang

kesetaraan, bukan sebagai alasan untuk merendahkan bahasa daerah atau menutup keberagaman.

Katakunci: Mohammad Tabrani; kepemimpinan sosial; Bahasa Indonesia; identitas nasional; Kongres Pemuda; nasionalisme.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Elman, M. (2026). Kepemimpinan Sosial Muhammad Tabrani dalam Konstruksi Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional. Jurnal Ilmiah Sosio Humaniora Dan Kearifan Lokal, 1(1), 105-115. https://ejournal.rumohjurnal.org/index.php/jusokal/article/view/88

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia sering dipahami sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya hadir dalam kehidupan berbangsa: bahasa sekolah, administrasi, media, ilmu pengetahuan, dan komunikasi lintas daerah. Karena terlalu dekat dengan kehidupan sehari-hari, proses sejarah yang membuatnya menjadi bahasa nasional kerap terlupakan. Padahal, bahasa nasional bukan benda yang muncul dengan sendirinya. Ia merupakan hasil keputusan, perdebatan, organisasi, keberanian politik, dan kesediaan masyarakat membayangkan diri sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Di balik bahasa yang kini terasa alamiah itu terdapat kerja sosial para tokoh pergerakan yang berhadapan dengan kolonialisme, kesetiaan kedaerahan, perbedaan bahasa, dan pertanyaan mendasar: atas dasar apa orang-orang dari wilayah yang berbeda dapat menyebut diri sebagai satu bangsa?

Dalam proses tersebut, Mohammad Tabrani Soerjowitjitro—sering ditulis M. Tabrani—menempati posisi yang penting. Ia lahir di Pamekasan, Madura, pada 10 Oktober 1904 dan bekerja sebagai jurnalis di harian Hindia Baroe. Melalui tulisan-tulisannya pada awal 1926, Tabrani memopulerkan gagasan penamaan "Bahasa Indonesia" sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat bahwa tulisan "Kasihan" terbit pada 10 Januari 1926 dan tulisan "Bahasa Indonesia" pada 11 Februari 1926. Dalam konteks tersebut, bahasa tidak sekadar dibicarakan sebagai perangkat linguistik, tetapi sebagai dasar simbolik untuk membangun bangsa yang belum memiliki kedaulatan politik (Maryanto, 2022; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021).

Peran Tabrani menjadi semakin jelas ketika ia memimpin Kongres Pemuda Pertama pada 30 April–2 Mei 1926. Dalam perdebatan mengenai bahasa persatuan, Mohammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu, sedangkan Tabrani mempertahankan nama Bahasa Indonesia. Perbedaan itu bukan pertengkaran kecil mengenai label. Di dalamnya terdapat persoalan politik tentang siapa yang berhak memberi nama kepada bangsa, bagaimana identitas bersama dibentuk, dan apakah bahasa persatuan harus dipahami sebagai warisan linguistik yang sudah tersedia atau sebagai proyek kebangsaan yang perlu diciptakan. Tabrani memilih kemungkinan kedua: bahasa yang akan mempersatukan bangsa harus menyandang nama bangsa yang sedang diperjuangkan.

Artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana kepemimpinan sosial Tabrani berperan dalam konstruksi Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, dan apa relevansinya bagi kehidupan kebangsaan saat ini? Argumen yang dikembangkan adalah bahwa kepemimpinan Tabrani bertumpu pada empat kemampuan yang saling berkaitan: membangun ruang pertemuan antarkelompok pemuda, menggunakan pers untuk membentuk opini publik, mempertahankan visi simbolik di tengah perbedaan, dan menghubungkan bahasa dengan masa depan politik Indonesia. Dengan demikian, kontribusinya tidak cukup dinilai dari apakah ia "menemukan" bahasa, melainkan dari caranya mengubah nama bahasa menjadi gagasan sosial yang dapat diterima dan diperjuangkan bersama. Pembacaan ini juga menghindari dua penyederhanaan. Pertama, sejarah Bahasa Indonesia tidak boleh direduksi menjadi karya seorang tokoh tunggal. Bahasa Melayu telah lama berfungsi sebagai lingua franca di berbagai wilayah Nusantara, sementara banyak organisasi dan tokoh turut mengembangkan nasionalisme Indonesia. Kedua, pengakuan terhadap Tabrani tidak seharusnya dibatasi pada romantisasi kepahlawanan. Yang perlu dikaji adalah bagaimana ia bekerja secara sosial: membangun agenda, mengelola perbedaan, memanfaatkan media, dan mengusulkan horizon kebangsaan yang lebih luas daripada identitas lokal.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan kajian pustaka historis-kritis dengan pendekatan sosiologi sejarah. Bahan kajian meliputi tulisan kelembagaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, artikel penelitian sejarah mengenai peran Tabrani dalam Kongres Pemuda 1925–1928, serta kajian tentang Bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan nasional. Sumber-sumber tersebut dibaca secara komparatif untuk mengidentifikasi kronologi, peran aktor, gagasan kebahasaan, dan makna sosial dari keputusan-keputusan yang diambil. Analisis dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, rekonstruksi konteks: situasi kolonial, pertumbuhan organisasi pemuda, dan peran pers pada dekade 1920-an. Kedua, interpretasi tindakan: gagasan penamaan Bahasa Indonesia, kepemimpinan kongres, dan perbedaan pandangan dengan Yamin dibaca sebagai tindakan sosial yang memiliki konsekuensi politik. Ketiga, dialog teoretis: fakta historis dihubungkan dengan konsep kepemimpinan sosial, konstruksi identitas, dan komunitas terbayang. Karena artikel ini merupakan kajian pustaka, ia tidak mengklaim menghasilkan temuan lapangan baru. Kesimpulan dibatasi pada sumber yang tersedia dan perlu dibaca sebagai interpretasi argumentatif, bukan sebagai pengganti penelitian arsip yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Kepemimpinan sosial: memengaruhi, menghubungkan, dan membangun tujuan bersama

Kepemimpinan sosial tidak identik dengan jabatan formal atau kekuasaan yang memerintah dari atas. Dalam pengertian relasional, pemimpin menjadi penting ketika ia mampu membantu kelompok yang berbeda merumuskan masalah bersama, membangun kepercayaan, serta mengarahkan tindakan menuju tujuan kolektif. Burns (1978) membedakan kepemimpinan transaksional yang bertumpu pada pertukaran dari kepemimpinan transformasional yang mengubah orientasi dan aspirasi pengikut. Dalam konteks Tabrani, nilai kepemimpinannya tampak pada upaya menggeser orientasi pemuda dari kesetiaan yang terbatas pada organisasi dan daerah menuju imajinasi kebangsaan. Northouse (2021) menekankan kepemimpinan sebagai proses pengaruh antara pemimpin dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Perspektif ini membantu melihat bahwa pengaruh Tabrani bukan hanya berasal dari kedudukannya sebagai ketua kongres, tetapi juga dari kemampuannya merumuskan bahasa persatuan sebagai tujuan yang lebih besar. Ia tidak cukup hanya mengatur jalannya pertemuan; ia mengajukan pertanyaan konseptual tentang nama dan masa depan bangsa. Kepemimpinan sosial, dengan demikian, dapat dibaca sebagai kombinasi kapasitas organisatoris, komunikasi publik, dan keberanian mempertahankan visi.

2 Bahasa, identitas, dan konstruksi sosial

Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa kenyataan sosial dibentuk dan dipertahankan melalui tindakan manusia, pelembagaan, serta pengakuan bersama. Identitas nasional dari sudut ini bukan sifat alamiah yang tinggal ditemukan, melainkan hasil proses sosial yang terus direproduksi. Bahasa nasional merupakan salah satu institusi simbolik yang memungkinkan orang dari latar berbeda mengidentifikasi diri sebagai anggota komunitas yang sama. Penamaan “Bahasa Indonesia” karena itu bersifat performatif: ia bukan hanya menyebut sesuatu yang sudah mapan, tetapi ikut membantu menghadirkan objek sosial bernama Indonesia. Anderson (1983/2006) menggunakan konsep imagined communities untuk menjelaskan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan. Anggota bangsa

tidak mungkin mengenal semua anggota lainnya secara langsung, tetapi mereka membayangkan adanya ikatan bersama melalui simbol, media, sejarah, dan praktik komunikasi. Pers cetak membantu pembentukan kesadaran tersebut karena memungkinkan gagasan yang sama beredar melampaui ruang lokal. Dalam kasus Tabrani, surat kabar menjadi sarana untuk mengedarkan nama Bahasa Indonesia dan menghubungkan pembaca ke dalam cakrawala kebangsaan yang lebih luas.

3 Nasionalisme dan politik penamaan

Gellner (1983) menyoroti hubungan antara nasionalisme, budaya, dan pembentukan masyarakat modern, sedangkan Hobsbawm (1990) mengingatkan bahwa tradisi nasional sering dibangun melalui proses seleksi, pengulangan, dan pelembagaan. Kerangka ini tidak berarti identitas nasional palsu atau tidak sah. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa simbol kebangsaan memperoleh kekuatan karena dikerjakan, diperdebatkan, dan diakui secara sosial. Penamaan bahasa menjadi tindakan politik karena menentukan bagaimana suatu komunitas membayangkan dirinya. Pilihan nama "Bahasa Indonesia" menghubungkan alat komunikasi dengan subjek politik yang sedang diperjuangkan: bangsa Indonesia. Nama tersebut membawa orientasi ke depan. Jika "Melayu" menunjuk pada tradisi bahasa yang telah lama digunakan di kawasan Nusantara, "Indonesia" menandai cita-cita untuk menjadikan bahasa itu milik bersama komunitas politik baru. Dua istilah tersebut tidak harus dipertentangkan secara mutlak; Bahasa Indonesia tumbuh dari tradisi Melayu, tetapi memperoleh makna kebangsaan baru melalui proses sosial dan politik Kahin, G. M. T. (1952).

4. Tabrani dan Konteks Sosial Pergerakan Nasional

Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda dihuni masyarakat dengan keragaman bahasa, agama, adat, dan pengalaman politik. Organisasi pemuda tumbuh dengan basis etnis atau wilayah, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, dan organisasi lainnya. Organisasi-organisasi tersebut berperan penting dalam menyediakan ruang belajar berorganisasi dan membentuk kesadaran kolektif, tetapi identitas yang menjadi titik berangkatnya juga memperlihatkan batas-batas persatuan yang masih harus dinegosiasikan.Tabrani bergerak dalam ruang sosial yang sedang berubah. Sebagai jurnalis Hindia Baroe, ia berada di persimpangan antara wacana publik, pergerakan pemuda, dan aspirasi politik. Pers bukan sekadar media untuk menyampaikan kabar, melainkan arena untuk memperkenalkan konsep, membentuk opini, dan memperluas percakapan di luar ruang rapat. Kajian Badan Bahasa menyebut bahwa melalui kolom "Kepentingan", Tabrani mengangkat tulisan "Kasihan" pada Januari 1926 dan kemudian "Bahasa Indonesia" pada Februari tahun yang sama. Gagasan bahasa persatuan dengan nama Indonesia hadir sebelum istilah itu dilembagakan dalam Sumpah Pemuda Hobsbawm, E. J. (1990).

Di sini terlihat bahwa kepemimpinan dapat dimulai sebelum seseorang memperoleh pengakuan resmi. Tabrani terlebih dahulu menyusun masalah dalam ruang publik: bagaimana bangsa yang beragam dapat memiliki bahasa bersama, dan mengapa nama bahasa itu harus mengacu pada bangsa yang hendak dibangun? Pertanyaan ini mengubah bahasa dari urusan teknis komunikasi menjadi urusan masa depan politik. Ia menantang anggapan bahwa bangsa harus menunggu sampai terbentuk secara formal sebelum dapat memiliki bahasa bernama Indonesia Kohn, H. (1944). Bagi Tabrani, justru penamaan dan penggunaan bahasa Indonesia merupakan bagian dari proses melahirkan bangsa itu sendiri.

5. Kepemimpinan Tabrani dalam Kongres Pemuda Pertama

Membangun forum lintas organisasi

Salah satu aspek penting kepemimpinan Tabrani ialah kerja organisatoris yang mendahului Kongres Pemuda. Penelitian Madhiyah, Humaidi, dan Yanuardi (2021) menyoroti perannya dalam mempersiapkan Kongres Pemuda Pertama dan menghubungkannya dengan pergerakan nasional. Forum tersebut tidak lahir di ruang kosong. Ia membutuhkan komunikasi antarkelompok, penentuan agenda, pengorganisasian peserta, serta keyakinan bahwa organisasi yang memiliki latar berbeda bersedia duduk dalam satu ruang.

Kepemimpinan semacam ini sering kurang terlihat dalam narasi sejarah yang lebih menyukai pidato besar dan momen deklarasi. Padahal, sebelum sebuah deklarasi menjadi peristiwa nasional, seseorang harus membangun kondisi sosial yang memungkinkan deklarasi itu terjadi. Tabrani memainkan peran sebagai penghubung: ia membantu menjadikan pertemuan antarpemuda bukan hanya kesempatan saling mengenal, melainkan ruang untuk membicarakan kepentingan yang melampaui organisasi masing-masing. Kemampuan mempertemukan pihak berbeda merupakan bentuk kepemimpinan sosial karena persatuan tidak dapat diwujudkan melalui seruan abstrak tanpa infrastruktur pertemuan.

Perbedaan dengan Mohammad Yamin: konflik sebagai ruang pembentukan gagasan

Momen paling tajam dalam peran Tabrani muncul dalam perdebatan mengenai bahasa persatuan. Mohammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu, yang memiliki sejarah panjang sebagai bahasa perhubungan antardaerah. Tabrani menerima pentingnya bahasa sebagai pemersatu, tetapi menolak nama "bahasa Melayu" sebagai nama bahasa persatuan. Ia berpendapat bahwa bahasa itu perlu disebut Bahasa Indonesia. Dalam catatan yang dirujuk Badan Bahasa, Tabrani menegaskan bahwa jika Bahasa Indonesia belum ada, bahasa itu harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia.

Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukan berarti menghindari konflik. Pemimpin sosial justru perlu membedakan konflik yang merusak dari perbedaan yang membantu kelompok memperjelas tujuan. Secara linguistik, usulan Yamin memiliki dasar historis; secara simbolik-politik, keberatan Tabrani menyentuh pertanyaan yang berbeda: nama apa yang paling mampu mengikat bahasa itu dengan cita-cita kemerdekaan? Ia memindahkan diskusi dari asal-usul bahasa ke arah identitas kolektif yang hendak dibangun.

Sikap Tabrani dapat dipahami sebagai tindakan visioner, tetapi tidak perlu dibaca sebagai kemenangan seorang tokoh atas tokoh lain. Perbedaan itu justru menunjukkan bahwa gagasan nasional dibentuk melalui argumentasi dan negosiasi. Keputusan akhir mengenai rumusan bahasa ditunda untuk dibicarakan pada kongres berikutnya, sementara proses pergerakan terus berlanjut. Dengan demikian, sejarah tidak bergerak lurus dari gagasan individual menuju pengesahan; ia bergerak melalui jeda, perdebatan, penerimaan bertahap, dan kontribusi banyak aktor Madhiyah, F. T., Humaidi, & Yanuardi, M. H. (2021).

Dari gagasan menjadi simbol yang dapat dibagikan

Gagasan politik baru menjadi kekuatan sosial ketika dapat dipahami, diulang, dan diadopsi oleh orang lain. Tabrani tidak hanya mengajukan istilah di ruang privat. Ia menuliskannya di surat kabar, membawanya ke forum pemuda, dan mengaitkannya dengan kebutuhan persatuan. Rangkaian tindakan

tersebut membantu memindahkan gagasan dari ranah individual ke ranah publik. Inilah salah satu mekanisme penting konstruksi identitas: suatu nama menjadi bermakna ketika digunakan dalam wacana bersama, dihubungkan dengan tujuan kolektif, dan akhirnya dilembagakan. Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 kemudian mengukuhkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam rumusan ikrar pemuda. Namun, menyebut 1928 sebagai satu-satunya titik kelahiran akan mengaburkan proses yang berlangsung sebelumnya. Kongres Pemuda Pertama pada 1926, tulisan Tabrani, serta perdebatan dengan Yamin merupakan bagian dari sejarah panjang yang menyiapkan kondisi bagi penerimaan tersebut. Sumpah Pemuda bukan awal dari ketiadaan, melainkan salah satu momen institusionalisasi gagasan yang telah dipertarungkan Maryanto. (2022, 2 Februari).

6. Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional

Bahasa sebagai jembatan melampaui identitas kedaerahan

Bahasa persatuan memiliki fungsi praktis: memungkinkan komunikasi lintas kelompok. Namun, dalam situasi kolonial, fungsi praktis itu memiliki konsekuensi politik. Ketika orang dari latar bahasa berbeda dapat berdiskusi, menulis, berorganisasi, dan membayangkan masa depan melalui satu bahasa bersama, mereka memperoleh sarana untuk membentuk solidaritas yang tidak sepenuhnya bergantung pada asal-usul etnis. Bahasa Indonesia menjadi jembatan yang memungkinkan perbedaan tidak harus dihapus agar persatuan dapat dibangun. Penting dicatat bahwa Bahasa Indonesia tidak lahir dengan meniadakan bahasa Melayu atau bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia tumbuh dari tradisi Melayu yang telah berfungsi sebagai lingua franca, lalu memperoleh nama dan orientasi politik baru dalam gerakan nasional. Perubahan ini menunjukkan bahwa identitas nasional tidak harus memutus hubungan dengan sejarah lokal; ia dapat mengolah warisan yang tersedia untuk tujuan baru. Justru kemampuan menghubungkan warisan dan cita-cita itulah yang membuat bahasa persatuan dapat diterima oleh kelompok yang beragam.

Penamaan sebagai tindakan politik

Nama “Bahasa Indonesia” menyimpan klaim tentang kepemilikan bersama. Ia tidak menyebut bahasa itu sebagai milik satu suku, pulau, atau kelompok dominan, tetapi sebagai bahasa bangsa yang sedang dibayangkan. Dalam perspektif konstruksi sosial, penamaan merupakan tindakan yang ikut membentuk realitas: ketika istilah itu digunakan secara berulang, ia menyediakan kategori untuk memahami diri dan orang lain sebagai sesama anggota bangsa. Dengan kata lain, nama bahasa bukan sekadar label netral; ia menawarkan jawaban atas pertanyaan tentang siapa “kita”.

Kekuatan simbolik ini menjelaskan mengapa pilihan Tabrani penting. Ia menyadari bahwa bahasa yang dipakai untuk mempersatukan masyarakat perlu memiliki nama yang mengarah pada identitas kolektif yang ingin diwujudkan. Nama “Indonesia” membawa masa depan ke dalam percakapan masa kini. Bangsa belum sepenuhnya merdeka, tetapi bahasa yang dinamai Indonesia memungkinkan para pemuda berlatih menjadi bagian dari bangsa tersebut sebelum kemerdekaan politik tercapai Northouse, P. G. (2021).

Pers dan pembentukan komunitas terbayang

Konsep Anderson (2006) tentang komunitas terbayang membantu menjelaskan mengapa peran jurnalistik Tabrani tidak dapat dipisahkan dari gagasan kebahasaannya. Surat kabar menghubungkan pembaca yang tidak saling mengenal melalui isu dan bahasa yang sama. Pembaca di tempat berbeda dapat

merasa terlibat dalam percakapan publik yang lebih luas daripada komunitas lokalnya. Pers menyediakan ruang tempat identitas nasional dapat dibicarakan, dibayangkan, dan diperdebatkan. Dalam pengertian ini, Tabrani menjalankan kepemimpinan melalui produksi wacana Renan, E. (1990). Ia tidak harus memiliki kekuasaan negara untuk mengarahkan percakapan tentang masa depan. Dengan memilih topik, memberi nama, dan menyebarkan argumen, jurnalis dapat memengaruhi cara masyarakat memahami masalah. Kepemimpinan media yang ia praktikkan relevan hingga kini: media dapat memperluas solidaritas, tetapi juga dapat memperuncing perpecahan. Perbedaannya terletak pada apakah ruang publik dipakai untuk membangun tujuan bersama atau untuk mengukuhkan prasangka.

7. Membaca Kembali Tabrani: Kontribusi, Batas, dan Historiografi

Pengakuan terhadap Tabrani penting karena narasi sejarah nasional sering memusatkan perhatian pada peristiwa yang telah mapan dan tokoh yang paling sering disebut. Ketika Sumpah Pemuda diperingati, nama-nama yang hadir dalam rumusan ikrar lebih mudah diingat daripada orang yang bekerja pada tahap konseptual dan organisatoris sebelumnya. Pemulihan peran Tabrani membantu memperluas pemahaman tentang bagaimana identitas nasional dibentuk: bukan hanya melalui deklarasi, tetapi juga melalui tulisan, rapat, perdebatan, dan keputusan yang semula belum memperoleh pengakuan luas. Meski demikian, koreksi historiografis tidak seharusnya berubah menjadi pembalikan yang menyederhanakan sejarah Smith, A. D. (1991). Menyebut Tabrani sebagai tokoh penting tidak berarti menganggap bahwa Bahasa Indonesia sepenuhnya diciptakan oleh satu orang atau bahwa peran Yamin, Soegondo Djojopoespito, para peserta kongres, organisasi pemuda, dan tradisi Melayu menjadi tidak relevan. Bahasa nasional adalah hasil interaksi antara kondisi historis, sumber daya linguistik yang telah tersedia, jaringan organisasi, dan pilihan politik Sutherland, H. (1979). Tabrani menonjol karena mendorong nama "Bahasa Indonesia" dan memimpin forum penting, tetapi keberhasilan gagasan tersebut bergantung pada penerimaan kolektif. Sikap kritis juga menuntut kehati-hatian terhadap kisah-kisah dramatis yang hanya bersumber dari penuturan sekunder. Kutipan tentang perdebatan Tabrani dan Yamin, misalnya, perlu ditelusuri pada sumber primer dan konteks penerbitannya jika digunakan dalam penelitian akademik yang lebih mendalam. Artikel ini memanfaatkan rujukan kelembagaan dan kajian sejarah yang tersedia, tetapi penelitian lanjutan idealnya memeriksa arsip Hindia Baroe, notula kongres, surat-menyurat, dan otobiografi secara langsung. Langkah tersebut akan membantu membedakan fakta yang terdokumentasi, ingatan retrospektif, dan interpretasi penulis sejarah. Ada pula dimensi geografis yang layak ditekankan. Tabrani berasal dari Pamekasan, Madura, tetapi gagasannya tidak berhenti pada identitas asalnya. Hal ini memberi pelajaran bahwa seseorang dapat berangkat dari pengalaman lokal tanpa terkurung di dalamnya. Identitas lokal bukan penghalang bagi nasionalisme; pengalaman lokal dapat menjadi sumber kepekaan untuk memahami pentingnya ruang bersama. Dalam masyarakat Indonesia hari ini, pelajaran itu relevan bagi upaya membangun kepemimpinan yang berakar pada komunitas, tetapi tetap sanggup bekerja lintas batas.

8. Relevansi Kontemporer: Persatuan tanpa Penyeragaman

Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi negara, bahasa pendidikan, bahasa administrasi, dan sarana komunikasi lintas wilayah. Keberhasilan ini tidak berarti tugas kebangsaan selesai. Di ruang digital, bahasa dapat menjadi medium solidaritas, tetapi juga alat penghinaan, polarisasi, dan penyebaran informasi palsu. Semangat Tabrani mengingatkan bahwa bahasa persatuan memperoleh makna bukan hanya karena

dipakai bersama, melainkan karena dipakai untuk membangun ruang publik yang memungkinkan warga berbeda saling memahami. Tantangan pertama adalah menjaga Bahasa Indonesia tetap inklusif. Bahasa nasional semestinya membuka akses terhadap pendidikan, pengetahuan, layanan publik, dan partisipasi politik Wijanarko, R. (2019). Jika kemampuan berbahasa baku dijadikan ukuran tunggal kecerdasan atau martabat seseorang, bahasa persatuan justru berubah menjadi mekanisme eksklusi. Kepemimpinan sosial yang berpijak pada semangat Tabrani seharusnya memperluas partisipasi, bukan mempermalukan orang karena aksen, dialek, atau latar pendidikannya. Tantangan kedua ialah menjaga hubungan yang sehat antara Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Persatuan tidak identik dengan keseragaman. Bahasa daerah menyimpan pengetahuan ekologis, sejarah keluarga, sastra lisan, humor, etika sosial, dan cara masyarakat memahami dunia. Menguatkan Bahasa Indonesia tidak mensyaratkan pelemahan bahasa Madura, Jawa, Sunda, Bugis, Minangkabau, atau bahasa-bahasa lainnya. Sebaliknya, masyarakat yang percaya diri dengan bahasa nasional semestinya mampu merawat keragaman bahasanya. Tantangan ketiga menyangkut kepemimpinan di ruang publik. Tabrani menggunakan media untuk menyebarkan gagasan yang belum menjadi konsensus. Pada masa kini, pemimpin sosial perlu memiliki keberanian serupa untuk mengajukan gagasan, tetapi juga tanggung jawab untuk memeriksa fakta, mendengarkan keberatan, dan menghindari manipulasi. Persatuan tidak dibangun dengan membungkam perbedaan Woring, A. (2022). Ia dibangun ketika perbedaan dapat dibahas tanpa menghilangkan martabat pihak lain. Akhirnya, pengalaman Tabrani mengajarkan bahwa simbol nasional harus terus diberi isi. Bahasa Indonesia dapat menjadi simbol yang kosong jika tidak digunakan untuk memperjuangkan keadilan, akses pendidikan, pengetahuan yang dapat dipahami publik, dan percakapan lintas kelompok. Identitas nasional yang hidup bukan sekadar hafalan ikrar, melainkan praktik sehari-hari: bersedia mendengar, menjelaskan, menerjemahkan pengalaman, dan mengakui bahwa tidak seorang pun memiliki monopoli atas makna Indonesia.

KESIMPULAN

Kepemimpinan sosial Mohammad Tabrani memiliki arti penting dalam konstruksi Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional karena ia menghubungkan gagasan kebahasaan dengan kerja organisatoris dan cita-cita politik. Melalui tulisan di Hindia Baroe, kepemimpinannya dalam Kongres Pemuda Pertama, serta pendiriannya mengenai nama Bahasa Indonesia, Tabrani mendorong pemuda melihat bahasa bukan semata-mata sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai simbol dan sarana untuk membangun bangsa. Pilihan nama itu mengandung visi: komunitas politik Indonesia dapat dibayangkan dan diperjuangkan bahkan sebelum kemerdekaan formal tercapai. Dari perspektif kepemimpinan sosial, Tabrani menampilkan kemampuan menghubungkan kelompok yang berbeda, mengangkat gagasan ke ruang publik, dan mempertahankan visi di tengah perbedaan. Dari perspektif konstruksi sosial dan komunitas terbayang, gagasan Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa identitas nasional dibentuk melalui penamaan, komunikasi, pengulangan, dan pengakuan kolektif. Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak penting, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari proses yang telah dirintis sebelumnya dan dilanjutkan oleh banyak aktor. Kontribusi Tabrani perlu dipulihkan tanpa menghapus peran tokoh lain atau mengabaikan akar Melayu Bahasa Indonesia. Pembacaan yang adil menempatkannya sebagai salah satu penggerak penting dalam proses kolektif pembentukan bahasa nasional. Pada masa kini, warisan kepemimpinannya mengingatkan bahwa persatuan tidak harus berarti penyeragaman. Bahasa Indonesia

perlu terus dikembangkan sebagai ruang bersama yang inklusif, sementara bahasa daerah tetap dirawat sebagai sumber kekayaan budaya dan pengetahuan. Dengan demikian, gagasan Tabrani bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga etika sosial untuk merawat Indonesia yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.). Verso. (Karya asli diterbitkan 1983).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). Mohammad Tabrani Soerjowitjitro: Jurnalis penggagas Bahasa Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.

Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row.

Gellner, E. (1983). Nations and nationalism. Cornell University Press.

Hobsbawm, E. J. (1990). Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Cambridge University Press.

Maryanto. (2022, 2 Februari). Sang penggagas bahasa persatuan Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/artikel-detail/2747/sang-penggagas-bahasa-persatuan-indonesia

Madhiyah, F. T., Humaidi, & Yanuardi, M. H. (2021). Mohammad Tabrani Soejowitjirto: Peran dalam Kongres Pemuda 1925–1928. PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 3(2). https://doi.org/10.21009/periode.032.2

Northouse, P. G. (2021). Leadership: Theory and practice (9th ed.). SAGE Publications.

Farhan, Y. (2019). Sang pemancar: Kiprah Moh. Tabrani dalam pergerakan nasional dan jurnalistik tahun 1923–1939. Dalam Prosiding Semiloka Sejarah Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Dwijaya, G. (2024). Bahasa Indonesia (Bahasa perjuangan bangsa 1908–1938). PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 6(1). https://doi.org/10.21009/periode.061.4.

Woring, A. (2022). Sumpah Pemuda merupakan cikal bakal tercetusnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 1928–1954 (suatu tinjauan historis). Danadyaksa Historica.

Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.). Verso. (Karya asli diterbitkan 1983).

Anderson, B. (1990). Language and power: Exploring political cultures in Indonesia. Cornell University Press.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). Mohammad Tabrani Soerjowitjitro: Jurnalis penggagas Bahasa Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.

Billig, M. (1995). Banal nationalism. SAGE Publications.

Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row.

Deutsch, K. W. (1966). Nationalism and social communication: An inquiry into the foundations of

nationality (2nd ed.). MIT Press.
Dhakidae, D. (1999). Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru. Gramedia Pustaka Utama.
Gellner, E. (1983). Nations and nationalism. Cornell University Press.
Hobsbawm, E. J. (1990). Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Cambridge University Press.
Kahin, G. M. T. (1952). Nationalism and revolution in Indonesia. Cornell University Press.
Kohn, H. (1944). The idea of nationalism: A study in its origins and background. Macmillan.
Madhiyah, F. T., Humaidi, & Yanuardi, M. H. (2021). Mohammad Tabrani Soejowitjirto: Peran dalam Kongres Pemuda 1925–1928. PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 3(2). https://doi.org/10.21009/periode.032.2.
Maryanto. (2022, 2 Februari). Sang penggagas bahasa persatuan Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/artikel-detail/2747/sang-penggagas-bahasa-persatuan-indonesia.
Northouse, P. G. (2021). Leadership: Theory and practice (9th ed.). SAGE Publications.
Renan, E. (1990). What is a nation? Dalam H. K. Bhabha (Ed.), Nation and narration (hlm. 8–22). Routledge. (Karya asli disampaikan pada 1882).
Smith, A. D. (1991). National identity. University of Nevada Press.
Sutherland, H. (1979). The making of a bureaucratic elite: The colonial transformation of the Javanese priyayi. Heinemann Educational Books (Asia).
Wijanarko, R. (2019). Rethinking nationalism. Studia Philosophica et Theologica, 3(1). https://doi.org/10.35312/spet.v3i1.149.
Woring, A. (2022). Sumpah Pemuda merupakan cikal bakal tercetusnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 1928–1954 (suatu tinjauan historis). Danadyaksa Historica.